



## Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Desa Tetaf Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan

Stefanus Don Rade<sup>\*1</sup>, Ernesta Uba Wohon<sup>2</sup>, Ferdinandus Lobo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira

Email : [stefanusdonrade@unwira.ac.id](mailto:stefanusdonrade@unwira.ac.id)<sup>1\*</sup>, [ernestha160482@gmail.com](mailto:ernestha160482@gmail.com)<sup>2</sup>, [ferdinandlobo@unwira.ac.id](mailto:ferdinandlobo@unwira.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5, meningkat sebesar 0,09 poin dibanding tahun 2021. Namun kenaikan ini masih belum bisa diapresiasi karena IPK di bawah 50 menunjukkan Indonesia masih rawan korupsi. Agar pemberantasan korupsi di Indonesia semakin masif dan intensif, maka seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus mengambil peran dalam pemberantasan korupsi, tidak terkecuali siswa sekolah menengah pertama. Siswa sekolah menengah pertama dapat mengambil peran melalui penerapan nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya membangun integritas diri. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah menumbuhkan nilai-nilai Anti Korupsi pada siswa sekolah menengah pertama dengan cara sosialisasi nilai-nilai Anti Korupsi. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melalui pembelajaran dengan media video maupun diagram pohon. Metode ini digunakan agar pemahaman akan nilai-nilai Anti Korupsi sejak dini lebih dipahami dan diterapkan nilai-nilai Anti Korupsi seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin dan adil. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman nilai-nilai anti korupsi pada siswa sekolah menengah pertama.

**Kata Kunci:** Nilai-Nilai Anti Korupsi, Sosialisasi, Upaya Menumbuhkan.

### Abstract

Indonesia's Anti-Corruption Behavior Index (IPAK) 2022 was 3.93 on a scale of 0 to 5, an increase of 0.09 points compared to 2021. However, this increase still cannot be appreciated because GPA below 50 shows that Indonesia is still prone to corruption. In order for the eradication of corruption in Indonesia to be more massive and intensive, all elements of society in Indonesia must take a role in eradicating corruption, including junior high school students. Junior high school students can take a role through the application of anti-corruption values as an effort to build self-integrity. The purpose of this service activity is to foster Anti-Corruption values in junior high school students by socializing Anti-Corruption values. In its implementation, it is carried out through learning with video media and tree diagrams. This method is used so that the understanding of Anti-Corruption values from an early age is better understood and applied Anti-Corruption values such as honest, responsible, disciplined and fair. The results of the service show that there is an increased understanding of anti-corruption values in junior high school students.

**Keywords:** Anti-corruption values, socialization, efforts to grow.

### PENDAHULUAN

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5, meningkat sebesar 0,09 poin dibanding tahun 2021. Namun kenaikan ini masih belum bisa diapresiasi karena IPK di bawah 50 menunjukkan Indonesia masih rawan korupsi. Korupsi harus segera diberantas mengingat efeknya yang luar biasa, baik efek langsung berupa kerugian yang dialami negara, dan efek tidak langsung seperti resiko sosial hingga lahirnya sifat individualistik yang hanya mementingkan diri sendiri (Dj, 2019).

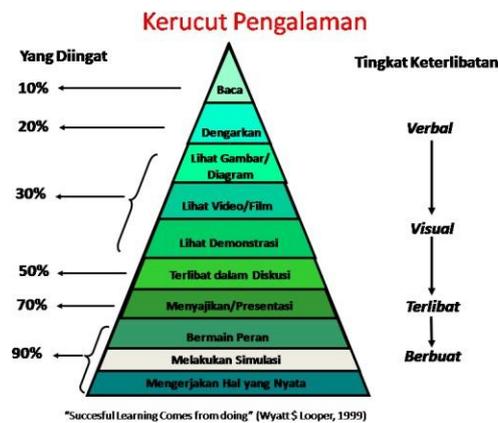
Korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anak, karena korupsi tidak hanya tentang kerugian negara namun pula tentang tidak adanya nilai-nilai integritas dalam diri individu. Sebagai contoh, sifat malas, suka mencontek, tidak jujur dan membolos adalah perilaku korupsi yang dilakukan oleh anak (Amelia, 2016).

Korupsi sendiri merupakan sebuah fenomena, karena sifatnya yang massif, tidak dilakukan sendiri, dan tidak dinikmati sendiri. Bourdieu menyebut ini sebagai suatu banalitas korupsi (Santoso & Meyrasyawati, 2015). Banalitas ini bahkan memberikan kesan bahwa korupsi itu berada dalam konteks kebudayaan. Artinya ini berhubungan erat dengan mentalitas, yang tentu terkait pula dengan pola asuh dan pola didik, serta lingkungan yang membentuk mentalitas/karakter.

Walaupun tidak banyak, namun sikap korupsi tersebut dilakukan oleh sebagian siswa di SMP Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Contoh sikap korupsi yang dilakukan siswa antara lain: 1) Setiap upacara bendera berlangsung, ada siswa yang terlambat (walau cuma 1 orang), 2) saat ada kuis maupun pekerjaan rumah ataupun ujian, ada siswa yang melakukan tindakan mencontek, 3) tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah ditugaskan. Sikap korupsi yang ditunjukkan sebagian kecil siswa sekolah menengah pertama di Desa Tetaf, TTS, tersebut harus segera dihilangkan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan sikap korupsi siswa adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai integritas dalam diri melalui pendidikan karakter (Dwi Kushrahmadi, 2007). Pendidikan karakter khususnya pendidikan anti korupsi harus dilakukan dengan serius khususnya pada lembaga pendidikan formal (Sari, 2020), mulai dari sekolah/madrasah sampai perguruan tinggi, menurut Pasal 3 UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional arah pembelajarannya ditargetkan untuk mencapai target yang diinginkan, yaitu para peserta didik memiliki karakter dan moral yang mulia sebagaimana tujuan Pendidikan Nasional. Hal ini tentu inheren dengan amanat konstitusi sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Negara berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 di titik ini sangat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dan materi muatan kurikulum didalamnya. Penguatan Pendidikan Karakter adalah bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang menyeimbangkan antara kemampuan kognitif dan mengasah kemampuan afektif siswa didik. Sehingga menjadi pribadi yang unggul namun berjiwa sosial dan religious.

Kegiatan pengabdian ini sasarannya ada pada siswa sekolah menengah pertama dengan mempertimbangkan aspek pendidikan karakter untuk menumbuhkan integritas lebih efektif diterapkan sedari dini (Kusrahmadi, 2018). Tujuan pendidikan karakter untuk menumbuhkan nilai-nilai integritas pada siswa dapat terlaksana dengan efektif, maka pendidikan karakter tidak hanya diberikan dalam bentuk materi namun juga praktik (Komara, 2018). Berdasarkan Teori Kerucut Pengalaman, pengalaman langsung secara kongkrit lebih banyak mempengaruhi hasil belajar seseorang, selain itu dipengaruhi pula oleh kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang lalu sampai pada benda tiruan. Sampai kepada lambang verbal (abstrak). Semakin keatas puncak kerucut semakin abstrak media penyampai pesan itu.



Gambar 1 Kerucut Pengalaman, sumber: <https://bagusdwiradyan.wordpress.com/2014/07/06/kerucut-pengalaman-cone-of-experience-edgar-dale/>

Jika melihat hal ini sebagai proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar.

Adanya pembelajaran secara langsung siswa diajak langsung memahami sekaligus juga mempraktekkan penerapan nilai-nilai integritas dengan pengalaman konkrit. Penguatannya pada bagian piramida terbawah yaitu benda tiruan dan pengalaman langsung melalui praktek.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada pengaduan masyarakat ini adalah: “Bagaimana cara menumbuhkan dan menerapkan nilai anti korupsi pada siswa sekolah menengah pertama saat ini?”

## METODE

Pengabdian dilakukan melalui sosialisasi dengan tema upaya-upaya menumbuhkan nilai anti korupsi pada siswa SMP di Desa. Sasaran atau responden yang dihadirkan mencakup siswa siswi sekolah menengah pertama di Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, TTS. Dalam proses sosialisasi dijelaskan mengenai jenis-jenis korupsi, faktor penyebab terjadinya korupsi, penanggulangan dan upaya-upaya menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Selanjutnya, dijelaskan mengenai korupsi dalam hukum nasional dan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai anti korupsi di atas disosialisasikan melalui metode Forum Group Discussion (FGD) di setiap kelas, untuk menggali lebih jauh mengenai tingkat pemahaman siswa, sekaligus sebagai cara yang lebih mudah untuk menanamkan pemahaman perihal nilai anti korupsi ini. Sedangkan untuk media yang digunakan adalah poster, video dan setiap kelompok membuat digram pohon. Pada akhir penyajian materi, disebarkan questioner untuk mengukur pemahaman siswa tentang nilai-nilai anti korupsi yang telah disosialisasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Menumbuhkan Nilai-nilai Anti Korupsi pada Siswa Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan upaya menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa SMP dimulai dengan perencanaan. Perencanaan ini berlangsung dengan keterlibatan pengabdian dengan kepala sekolah dan guru di sekolah menengah pertama. Dalam proses perencanaan ini, didapatkan hasil bahwa subjek pengabdian adalah siswa SMP kelas VII, kelas VIII dan kelas IX. Pendidikan nilai-nilai anti korupsi akan diintegrasikan dalam mata pelajaran PPKn.

Siswa kelas VII, kelas VIII dan kelas IX dipilih karena materi dan bobot yang akan diberikan, lebih cocok untuk siswa kelas tersebut. Ini merupakan hasil koordinasi dengan guru-guru kelas di SMP. Mata pelajaran PPKn dipilih karena ada kesamaan capaian pembelajaran, yaitu “Menumbuh kembangkan nilai-nilai anti korupsi”.

Langkah berikutnya adalah menyusun bahan pembelajaran. Materi pokok berasal dari: 1) Modul penguatan pendidikan anti korupsi untuk kelas VII-IX (Supriyatna et al., 2017); 2) kurikulum sekolah dasar; 3) tema pada mata pelajaran PPKn. Adapun tema terkait berupa: Bersikap berani, mengakui kesalahan, meminta maaf, memberi maaf, dan santun sebagai perwujudan nilai dan moral pancasila, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia.

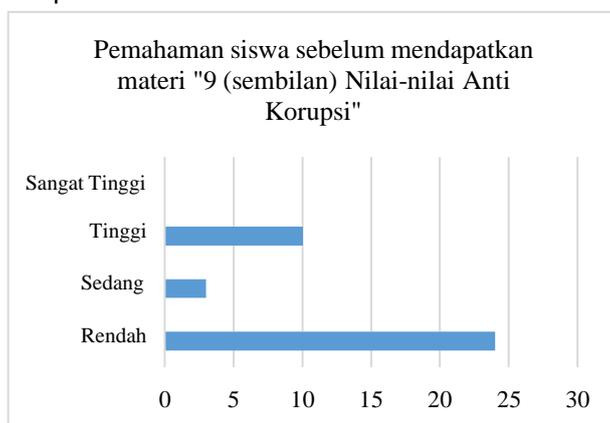
Bahan ajar tersebut disusun dalam bentuk: 1) modul yang berisikan kumpulan poster nilai-nilai anti korupsi, dan 2) video pembelajaran. Materi yang akan diajarkan adalah 9 (Sembilan) nilai-nilai pokok anti korupsi yang meliputi: 1) Berani; 2) Jujur; 3) Mandiri; 4) Peduli; 5) Adil; 6) Disiplin; 7) Kerja Keras; 8) Tanggung jawab, dan 9) Sederhana.

Dalam pelaksanaannya, digunakan sarana dan prasarana dalam penyampaian materi kepada para siswa. Paparan disampaikan oleh tim pengabdian yang berkolaborasi dengan guru di sekolah dasar tersebut. Selain itu, untuk memastikan pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi ini berjalan efektif, diberikan penugasan yang dilakukan oleh para siswa sekolah dasar.

Setelah seluruh kegiatan berlangsung, dilakukan evaluasi kegiatan, dengan cara memberikan penugasan kepada para siswa sekolah dasar yang mengikuti proses Pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Selain itu, diberikan questioner kepada seluruh wali murid kelas VII-IX untuk mengetahui progress siswa dalam hal peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pengisian questioner yang diisi oleh orang tua diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap pemahaman siswa tentang nilai-nilai anti korupsi.

Untuk penugasan, seluruh siswa kelas VII-IX diberi penugasan untuk memaparkan pemahaman mereka tentang 9 (sembilan) nilai-nilai anti korupsi. Hasil penugasan menunjukkan bahwa seluruh siswa oada kelas tersebut dapat memaparkan dengan baik (dalam bentuk gambar maupun essay) tentang 9 (Sembilan) nilai-nilai anti korupsi.

Untuk menilai efektifitas kegiatan, perihal pemahaman siswa, diberikan questioner untuk dijawab. Pertanyaan *pertama* perihal pemahaman siswa sebelum diberikan pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Berikut hasil questioner dari pertanyaan pertama:

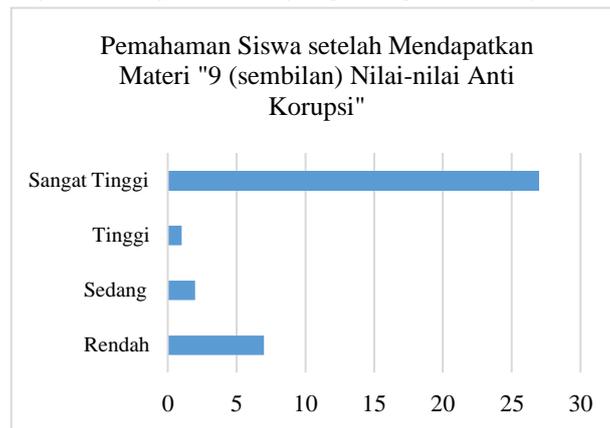


Gambar 2 Pemahaman Siswa Sebelum Mendapatkan Materi 9 Nilai-nilai Anti Korupsi

Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa 24 dari 37 siswa atau 65% (enam puluh lima persen) siswa memiliki pemahaman yang rendah tentang 9 sembilan nilai-nilai anti korupsi. Sebanyak 3 dari 37 siswa atau 8% (delapan persen) siswa memiliki pemahaman sedang tentang 9 sembilan nilai-nilai anti korupsi. Sebanyak 10 dari 37 siswa atau 27% (dua puluh tujuh persen) siswa memiliki pemahaman tinggi tentang 9 sembilan nilai-

nilai anti korupsi. Terakhir, tidak ada satu siswa pun yang memiliki pemahaman sangat tinggi terhadap 9 sembilan nilai-nilai anti korupsi.

Untuk pertanyaan *kedua*, perihal pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi setelah kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil jawaban questioner yang dibagikan, didapat data berikut:



Gambar 3 Pemahaman Siswa Setelah Mendapatkan Materi 9 Nilai-nilai Anti Korupsi

Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa setelah diberikan pemahaman perihal 9 nilai-nilai anti korupsi, terdapat progres kenaikan pemahaman siswa tentang hal tersebut. Jika pada gambar sebelumnya terdapat 65% siswa yang memiliki pemahaman yang rendah tentang 9 sembilan nilai-nilai anti korupsi, setelah diberikan materi, angka tersebut menurun menjadi 19%, yaitu 7 dari 37 siswa masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap 9 nilai-nilai anti korupsi. Siswa yang memiliki pemahaman sedang terhadap 9 nilai-nilai anti korupsi, yang semula 8% menjadi 5% atau 2 dari 37 siswa. Siswa yang memiliki pemahaman tinggi tentang 9 nilai anti korupsi, yang semua 27% menjadi 3% atau 1 dari 37 siswa. Terakhir, siswa yang memiliki pemahaman sangat tinggi perihal 9 sembilan nilai-nilai anti korupsi, yang semula 0% atau tidak ada siswa yg sangat memahami, berubah menjadi 73% siswa atau 27 dari 37 siswa. Gambar ini menunjukkan adanya lonjakan tingkat pemahaman perihal 9 nilai-nilai anti korupsi pada diri siswa sekolah dasar kelas 4, kelas 5 dan kelas 6.

### Upaya Menerapkan Nilai-nilai Anti Korupsi pada Siswa Sekolah Menengah Pertama

Setelah pemahaman siswa ditingkatkan perihal nilai-nilai anti korupsi, langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi dari nilai-nilai anti korupsi tersebut (Anam & Sakiyati, 2019). Penerapan nilai-nilai anti korupsi dapat dilakukan, salah satunya melalui keberadaan kantin kejujuran. Oleh karena itu, setelah siswa diberikan pemahaman, maka langkah selanjutnya dalam pengabdian ini adalah membentuk kantin kejujuran. Keberadaan kantin kejujuran ini didukung oleh para guru dan wali murid sekolah dasar. Diharapkan kantin kejujuran ini dapat membawa dampak positif dalam pendidikan karakter dan penerapan nilai-nilai anti korupsi, seperti jujur, adil, bertanggung jawab dan disiplin.

Selain itu, keberadaan kantin kejujuran juga dapat melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Untuk sarana, walaupun SMP di Desa Tetaf Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki koperasi, namun kelengkapan barang yang dijual terutama perlengkapan sekolah masih kurang. Sedangkan untuk prasarana, pembentukan kantin kejujuran sangat mungkin dilakukan sebab di SMP di Desa Tetaf Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan masih terdapat ruangan yang dapat dipergunakan sebagai lokasi kantin kejujuran. Selain itu, di kantin kejujuran juga akan disiapkan makanan sehat untuk para siswa, sehingga mereka tidak selalu membeli makanan yang mengandung banyak bahan pengawet makanan.

Bagi siswa, adanya kantin kejujuran adalah salah satu cara untuk belajar tentang nilai-nilai integritas dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Karakter siswa jujur dapat diasah dengan interaksi diantara

siswa sendiri. Karena pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan siswa yang turut serta langsung untuk melakukan proses jual beli dan pencatatan di kantin kejujuran maka proses menumbuhkan integritas nilai-nilai kejujuran berjalan kreatif dan mendorong kolaborasi serta interaksi sosial. Hal sejalan dengan kurikulum 2013 yang digunakan di SMP di Desa Tetaf Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pengembangan nilai-nilai integritas melalui Kantin Kejujuran sejalan dengan tujuan Satuan Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia antara lain: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Sayangnya, efektifitas keberadaan kantin kejujuran dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai anti korupsi pada diri siswa di SMP Mitra ini tidak dapat diukur, karena kondisi ekonomi orang tua dari para peserta didik saat ini, kondisi dunia yang baru saja mengalami pandemi Covid-19 dan resesi. Ini dapat menjadi bahan kajian tersendiri untuk penelitian maupun pengabdian berikutnya.

## SIMPULAN

Pemahaman siswa mengenai nilai-nilai anti korupsi dapat tetap diberikan melalui paparan perihal nilai-nilai anti korupsi kepada para siswa. Adapun agar lebih mempermudah proses pemahaman, pemberian materi nilai-nilai anti korupsi dilakukan dengan menggunakan media poster dan video animasi, selain metode ceramah yang dilakukan selama proses kegiatan berlangsung. Hasil menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman siswa tentang nilai-nilai anti korupsi. Sedangkan penerapan nilai-nilai anti korupsi dapat dilakukan melalui keberadaan kantin kejujuran. Kantin kejujuran diharapkan dapat menjadi wadah penerapan Pendidikan karakter yang bertumpu pada implementasi nilai-nilai anti korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Z. & Sinta H. (2016). Perilaku Menyontek Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Riset Tindakan Indonesi*, 1(1), 1–9.
- Anam, K., & Sakiyati, I. D. (2019). Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Dalam Pembentukan Karakter. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 21. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.130>
- Andi Samsu Alam & Ashar Prawitno. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 93–104.
- Arifa, F. N. (2020). Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19. *Info Singkat; Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XII(7/1), 6.
- Cholidah, F. E. and. (2021). Pendampingan Kelompok PKK Desa Mulyoagung dalam Proses Pemilu Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional. *J- DINAMIKA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(1), 70–86. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v6i1.2345>
- Dj, Y. (2019). TINDAKAN PREVENTIF PEMBERANTASAN KORUPSI. *Menara Ilmu*, XIII(2), 192–202.
- Dwi Kushrahmadi, S. (2007). Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Anak Sekolah Dasar. *Dinamika Pendidikan*, 14(1), 118–130.
- Herlina, H., & Suherman, M. (2020). Potensi Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (Pjok) Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease (Covid)-19 Di Sekolah Dasar. *Tadulako Journal Sport Sciences And Physical Education*, 8(1), 1–7.
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6(3). <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719>

- Izzah, L. (2019). Menumbuhkan Nilai-nilai Anti Korupsi Pada Anak Untuk Membentuk Karakter Melalui “ Semai Games .” *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 2(2), 84–95.
- Komara, E. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Abad 21. *SIPATAHOENAN: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, 4(1).
- Kusrahmadi, S. D. (2018). PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER ANAK USIA DINI DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA YANG BAIK. *HUMANIKA*. <https://doi.org/10.21831/hum.v8i1.21003>
- Mahmud. (2017). Integrasi Penanaman Nilai-nilai Pendidikan ANTikorupsi dengan Pembelajaran PPKn dan IPS di Sekolah dasar (Studi di SD Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 76. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.76-86>
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Review Politik*, 5(2), 22–45.
- Sari, D. P. (2020). Kreativitas Pendidikan Karakter di Keluarga pada Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 107–114.
- Suhery, Putra, T., & Jasmalinda. (2020). Strategi Peningkatan Kapasitas Petani dalam Komunitas Usaha Tani Jagung (*Zea mays* L) di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 1–4.
- Supriyatna, A., Kembara, M. D., Anas, Z., Tola, B., Hadiana, D., & Warsihna, J. (2017). Pendidikan Antikorupsi. Modul Penguatan Nilai-nilai Antikorupsi pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Tingkat SD/MI Kelas 4-6. *Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK*, 84.
- Suyatmiko, W., & Nicola, A. (2019). *Inisiatif Penguatan Lembaga Antikorupsi Indonesia : Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019*. Jakarta: Transparency International Indonesia.